

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN, REALISASI BELANJA MODAL, DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Survey Pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu)**

**Ersi Sisdianto**

**Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta**

**[hersidianto@gmail.com](mailto:hersidianto@gmail.com)**

**Dr. Nengsih, M.Si**

**Fakultas Ekonomi Binsis Universitas Mercu Buana Jakarta**

**[nengzihrahman@yahoo.com](mailto:nengzihrahman@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*Financial performance is a description of the achievement of the company's success can be interpreted as a result that has been achieved on various activities that have been done, Capital expenditure is the expenditure made in the framework of capital formation in the form of adding fixed assets / inventory that provides benefits over one accounting period. The management of regional assets in Decree of the Minister of Home Affairs No. 49/2001 is declared as a series of activities and actions on regional goods covering planning, determining needs, budgeting, standardization of goods and prices, procurement, storage, distribution, inventory, control, maintenance, security, utilization, Legal status and administration. Financial performance, capital expenditure realization has an influence on the quality of financial statements to be presented.*

**Keywords: *Financial performance, Capital Expenditure Realization, Management Management of Regional Assets and Quality of Financial Statements.***

**A. PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Halim dkk:2008). Sejalan dengan hal ini pengelolaan keuangan daerah harus tetap menjadi prioritas dalam semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), dikarenakan baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah semua tergantung dari pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

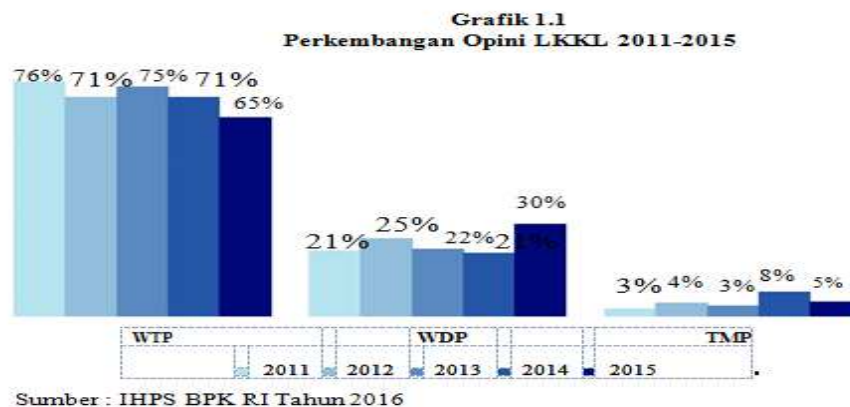
Kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) tersebut dibiayai oleh dana yang jumlahnya terbatas. Dana tersebut harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menciptakan hasil yang diinginkan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Pengelolaan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kinerja keuangan, realisasi belanja modal, pengelolaan manajemen aset, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh

Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas Pemerintah Daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Akan tetapi realita yang ada pada saat ini kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat banyak yang belum memenuhi standar pelaporan keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Yudi Anggota BPK RI (2015) hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian masih sangat minim hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya laporan keuangan instansi tersebut dan bisa dilihat dari grafik ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2016



Buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang diungkapkan oleh Ir. Joko Widodo Presiden RI (2015) bahwa penyerapan belanja modal yang direalisasikan oleh jajaran kementerian dan pemerintah masih sangat lambat, sejalan dengan hal itu lambatnya penyerapan realisasi belanja modal dikarenakan adanya ketakutan dari para pejabat daerah untuk mengambil kebijakan terkait belanja daerah (Bambang

Brojonegoro:2015) sehingga menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut, Selain dari lambatnya penyerapan realisasi belanja modal, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kinerja keuangan dan pengelolaan manajemen aset, seperti yang diungkapkan Fitra (2015) bahwasanya kinerja keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun ini paling buruk, indikator raihan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian dan Lembaga dipemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah mempunyai peranan penting terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

## **B. MATERI DAN METODE PENELITIAN**

### **1. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi,2012:2). Menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kerja

individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

## 2. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Menurut M.Dahlan Y.B (2003:978) realisasi adalah Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata sedangkan menurut Ali hasan (2008;239) realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.

Pengertian realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi merupakan suatu tidakan yang akan dilaksanakan oleh seseorang yang sifatnya nyata adanya perubahan dari sebuah rencana yang akan dikerjakan, baik itu yang berkaitan dengan belanja modal.

Menurut Halim dkk (2008) belanja modal adalah “ capital expenditure “ sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, sedangkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Belanja modal juga didefinisikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahaan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jala, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelian atau pengadaan atas aset tetap yang berwujud misalnya : pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung, pengadaan jalan dan irigasi serta aset tetap lainnya yang masa manfaatnya selama 12 (dua belas bulan) berjalan.

### 3. Pengelolaan Manajemen Aset Daerah

Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk berkerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga.

Menurut McHugh (dalam Ernie,2005:5) mengatakan bahwa : “ Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang – orang serta sumber daya organisasi lainnya”.

Menurut Siregar (2004:561), manajemen aset daerah dalam Keputusan Mendagri Nomor 49/2001 dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Dengan penyebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing aset yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model pengguna usahaan aset kepada pihak ke tiga yang beragam pula), maka pengelolaan aset mesti dilakukan dalam suatu program uang dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mesti menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai *good corporate governance*, dengan mengacu pada asas-asas keterbukaan (*transperancy*), serta tidak mengorbankan kepentingan public (*public server*). Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. (Siregar, 2004:561)

### 4. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memadai (Indra

Bastian, 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Indra Bastian, 2010). Keempat karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Indra Bastian, 2010).

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Indikator dari keberhasilan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang baik adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

### **C. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian kuantitatif lebih menekankan fenomena-fenomena objektif, dan maksimalisasi objektivitas, desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Moleong, 2011:2). Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan lainnya. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan perhitungan angka atau kuantitas (Moleong, 2011:1).

Menurut Sugiyono (2007:13) data penelitian pada pendekatan kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif yang digunakan adalah kuantitatif kausal karena bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan penyebab atau hubungan sebab akibat dari satu atau lebih masalah seperti yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah (Sekaran & Bougie, 2010:165).

Berdasarkan waktunya penelitian ini adalah *cross sectional* yaitu penelitian yang dilakukan pada periode waktu tertentu dan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2010:178).

#### **D. POPULASI DAN SAMPEL PENGUMPULAN DATA**

Menurut Sugiyono (2012:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian yang sudah dilakukan *purposive sampling* dengan memenuhi kriteria berjumlah 40 SKPD.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sebagai sentral penelitian dimana untuk peneliti juga mengambil data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah hasil dari penyebaran kuesioner kepada pejabat atau staf yang berkompetensi untuk memberikan jawaban terhadap kuesioner yang peneliti berikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Menurut Sugiyono (2012:120): Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Arikunto (2010:174) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *sampling jenuh* atau *sampling sensus* untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive*



*sampling*. Arikunto (2010:183) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

#### **E. TEKNIK DAN METODE PENGUMPULAN DATA**

Menurut Arikunto, (2006: 175) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pada sebuah penelitian diperlukan sebuah alat ukur yang biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi pengertian instrumen menurut Sugiyono (2010:148) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi yang dikirim langsung ke responden. Variabel yang menggunakan metode dokumentasi adalah opini audit BPK. Atau dengan kata lain opini audit BPK menggunakan data sekunder, selain itu peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sumber adalah laporan Laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2016.

Dalam pengambilan data berupa kusioner peneliti menggunakan metode analisis dengan menggunakan *skala likert* pengukuran dimana menurut Sugiyono (2008:132) mengatakan bahwa *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai alat pengolahan data yaitu *Partial Least Square* (PLS).

#### **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Setelah mendapatkan data dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini bisa dilihat dari jumlah target

penerimaan serta realisasi penerimaan pada rasio kemandirian seperti yang tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.9.1  
Total Target Pencapaian Pendapatan

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Target</b> | <b>2015</b>        |
|               | 1.022.977.351.406, |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Tabel. 4.9.2  
Total Realisasi Pendapatan

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Realisasi</b> | <b>2015</b>      |
|                  | 946.911.913.336. |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Tabel. 4.9.3  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Realisasi</b> | <b>2015</b>    |
|                  | 96.805.458.615 |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Tabel. 4.9.4  
Target Pendapatan Asli Daerah

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Target</b> | <b>2015</b>      |
|               | 122.175.736.000. |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengalami depisit penerimaan, pada tahun 2015 realisasi penerimaan sebesar Rp. 946.911.913.336 dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.022.977.351.406, untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan terhadap kualitas laporan keuangan maka bisa dihitung dengan cara melihat tingkat rasio kemandirian, rasio efesiensi, dan rasio efektivitas, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dari tabel target dan realisasi diatas maka bisa dihitung jumlah tingkat Rasio kemandirian dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel. 4.9.5  
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Kemandirian

|                          | 2015 |
|--------------------------|------|
| <b>Rasio Kemandirian</b> | 0,10 |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat rasio kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dilihat pada realisasi penerimaan dan target sangat berbanding terbalik hanya sebesar 10%, hal ini tentu saja akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan, dikarenakan penentuan rencana anggaran awal tahun yang sudah ditetapkan akan mengalami perubahan yang signifikan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian M Fajar Hidayat (2013) dimana kinerja keuangan tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun.

Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 4.9.6  
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Efektivitas

|                          | 2015 |
|--------------------------|------|
| <b>Rasio Efektivitas</b> | 0.79 |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Dari tabel perhitungan tingkat rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa tahun 2015 belum mencapai titik maksimal, sehingga hal ini bisa mengakibatkan berpengaruhnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, dikarenakan tidak adanya trend positif atas peningkatan rasio efektivitas kinerja keuangan, hal ini juga sejalan dengan penelitian Wilio Wondo (2016) dimana tingkat rasio efektivitas bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Rasio Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu termasuk dalam kategori cukup efektif karena di angka 79%, akan tetapi belum mencapai tingkat keefektivitasan, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak mencapai titik maksimal.

Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Akitva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Tabel 4.9.7  
Jumlah Aktiva Lancar Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

|                      | <b>2015</b>       |
|----------------------|-------------------|
| <b>Aktiva Lancar</b> | 66.998.833.906,11 |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Tabel 4.9.8  
Jumlah Hutang Lancar Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

|                      | <b>2015</b>       |
|----------------------|-------------------|
| <b>Hutang Lancar</b> | 17.169.527.685,40 |

Sumber:Hasil data diolah 2017

Maka dari data yang tersaji pada tabel Aktiva lancar dan hutang lancar diatas dapat dihitung tingkat rasio likuiditas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 4.9.9  
Rasio Likuiditas

|                             | <b>2015</b> |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Rasio<br/>Likuiditas</b> | 3,902       |

**Sumber: Hasil data diolah 2017**

Dari tabel tingkat rasio likuiditas laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu masih sangat kecil hanya mencapai 39, 2% hal ini sangat tidak menguntungkan sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

## 2. Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Modal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada pembahasan pengaruh realisasi belanja modal terhadap kualitas laporan keuangan, setelah melakukan hasil penelitian dengan menggunakan analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jumlah Belanja Modal Dibandingkan Dengan Jumlah Total Belanja  
Untuk melihat berapa besar jumlah belanja modal Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dibandingkan dengan jumlah total belanja modal bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.10.1  
Jumlah Anggaran Belanja Modal

|                                 | <b>2015</b>     |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Jumlah Belanja<br/>Modal</b> | 234.475.550.150 |

**Sumber: Hasil data diolah 2017**

Tabel. 4.10.2  
Realisasi Belanja Modal

|                                | <b>2015</b>     |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Realisasi Belanja Modal</b> | 220.791.457.089 |

Sumber: Hasil data diolah 2017

Tabel. 4.10.3  
Total Belanja

|                      | <b>2015</b>       |
|----------------------|-------------------|
| <b>Total Belanja</b> | 1.121.934.462.724 |

Sumber: Hasil data diolah 2017

Pada tahun 2015 anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal masih tetap mengalami kelebihan dimana bisa dilihat pada tabel diatas jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 1.121.934.462.724 sedangkan untuk realisasi anggaran belanja modal dan anggaran khusus belanja modal sebesar Rp. 220.791.457.089 dan Rp. 234.475.550.150, ditahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Bengkulu kembali membukukan kelebihan anggaran belanja modal sebesar Rp. 13.684.093.060,81. dan perbandingan belanja modal dengan anggaran belanja sebesar Rp. 887.458.912.574.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja modal belum dikelola secara maksimal, hal ini bisa dilihat pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mempunyai kelebihan anggaran belanja modal yang tidak direalisasikan sehingga harus dikembalikan ke kas Negara, dalam hal ini belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dimana sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Sri Hayati (2009) dimana belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan dalam realisasi anggaran Pemerintah sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun, sedangkan pada Fajar Nugroho (2012)

belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Realisasi pengeluaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan

Hasil analisis indikator realisasi pengeluaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.10.4  
Total Realisasi Pendapatan

|                  | <b>2015</b>      |
|------------------|------------------|
| <b>Realisasi</b> | 946.911.913.336. |

**Sumber:Hasil data diolah 2017**

Tabel. 4.10.5  
Total Belanja

|                          | <b>2015</b>       |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>Belanja</b> | 1.121.934.462.724 |

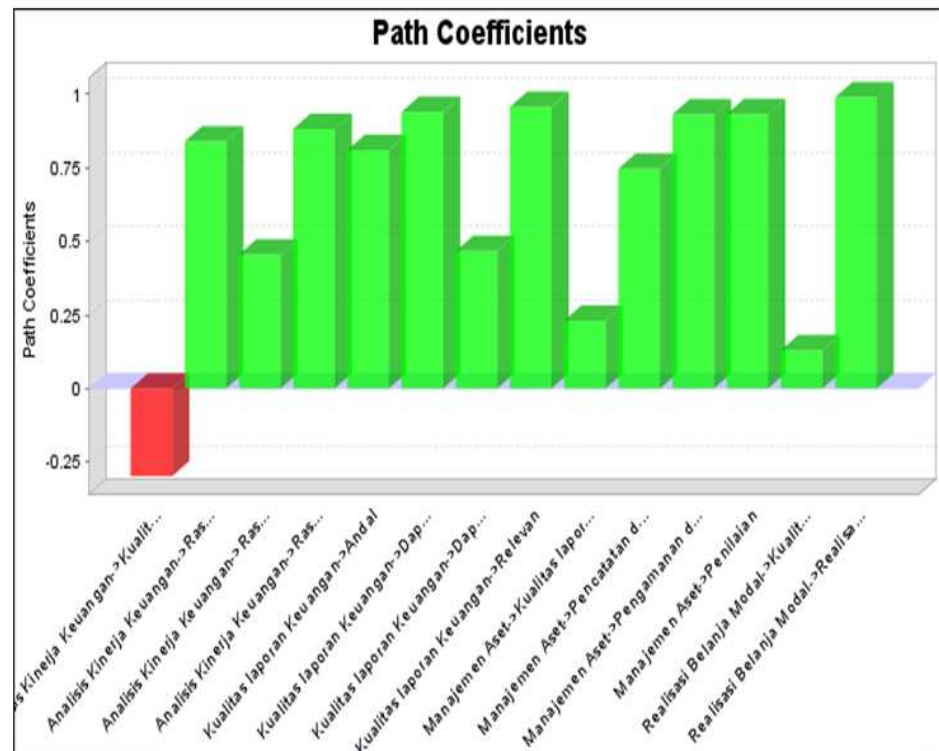
**Sumber:Hasil data diolah 2017**

Dari hasil analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang terdapat pada tabel hasil pengolahan data diatas dapat dilihat perbandingan penerimaan dengan pengeluaran, dimana pengeuaran lebih besar dengan penerimaan, hal ini sangat mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selalu membukukan defisit anggaran.

### 3. Analisis Pengaruh Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada pembahasan pengaruh pengelolaan manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan, setelah melakukan hasil penelitian dengan menggunakan pendistribusian kuesioner ke Satuan Keraja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dan diuji menggunakan metode smart PLS. Pada digram dibawah ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen aset daerah berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rudianto Simamora (2012) bahwa *that factors affecting the asset management division of the pst in the goverment of sout tapanuli include human resources knowledge asset management proof of ownership of asset, valuation of asset leadership commitment and attitude lack of awarness and responsibility management of assets after expansion area affects the quality of goverment financial repots.*



**Gambar 4.11.1**  
**Diagram Path Coefficients Variabel**

Sedangkan pada penelitian Hari Setiyawati (2015) bahwa implementasi manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan opini audit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan manajemen aset daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan, dimana tingkat pengaruh pengelolaan manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu mencapai tingkat *coefficients* lebih dari 75%.



### **G. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta analisis dari hasil dan pembahasan atas variabel kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan fenomena yang ada, bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan;
2. Realisasi belanja modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dan fenomena yang dikemukakan oleh para ahli bahwa adanya pengaruh realisasi belanja modal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu;
3. Seperti dengan realisasi belanja modal, pengelolaan manajemen aset daerah juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi bahwa pengelolaan manajemen aset daerah mempunyai andil besar dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang akan disajikan.

### **H. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa keterbatasan peneliti yaitu : Pertama, Generalisasi penelitian, hasil penelitian ini belum tentu sama jika penelitian yang sama dilakukan di objek penelitian yang lain, meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada hasil yang sama, Kedua instrumen yang dipakai oleh penelitian ini adalah metode penelitian analisis kuantitatif dimana peneliti mengandalkan informasi dari pejabat atau staf yang terkait dengan data yang ingin peneliti ambil serta menganalisis laporan keuangan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ketik angka atau tulisan sehingga peneliti

berharap dapat dimaklumkan dan membuka peluang bagi peneliti yang baru untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang sama.

Ketidakkampuan hasil penelitian ini untuk digeneralisasi pada tempat lain juga membuka kemungkinan yang besar untuk dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih umum mengenai pengaruh kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim dkk. 2004, "Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan", <http://swamandiri.org/2008/02/29>
- \_\_\_\_\_, . 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, . 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, . 2008. *Auditing*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Agnes Sawir,. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Almack, John C. 1930. *Research and thesis writing*. Houghton Mifflin Co.
- Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Medan
- Bertovic, Hrugo; Kaganova, Olga; Rutledge, John, 2002, *Asset Management Model for Local Governments, Local Government Reform Project (LGRP)*, The urban Institute
- Best. John W. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Disunting oleh sunting oleh Sanafiah faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya. Usaha Nasional.
- Bland, Robert & Samuel Nunn. 2002. "The impact of capital spending on municipal operating budgets" *Public Budgeting & Finance (Summer)*: 32-47.
- Bohn, Henning 2002. *Government Asset and Liability Management in an Era of Vanishing Public Debt*. Department of Economics. University of California at Santa Barbara
- Corley, K. G., & Gioia, D. A. 2011. *Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review*, 36 (1), 12-32.

- David Harianto, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi, Makassar.
- Doli Siregar., 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Fahmi Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta, Bandung
- Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang, 2008. *Filasafat Ilmu dan Metode Riset*, Usu Press, Medan.
- Helfert, E, A. 1991. *Analisis Laporan Keuangan* (terjemahan Herman Wibowo). Edisi ketujuh. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. 2002a. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir, 2002. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mulyadi, 2007. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moh. Nazir. 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. "The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People". The World Bank.
- Panduan Tesis. 2015. Program Pascasarjana Universitas Mercubuana. Edisi 3.
- Rai, I.G. Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uma Sekaran, Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th Edition. Wiley.
- Sularso., 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi. Purwokerto.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- \_\_\_\_\_, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: ALFABETA.
- Sector*. Studia Universitatis Babes Bolyai Oeconomica. Available at: <http://ssrn.com>.

- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490-495.
- Undang – undang (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005. Jakarta
- \_\_\_\_\_, (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Jakarta.